

**OPTIMALISASI *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM MENINGKATKAN  
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF DI  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Herlina

NPP. 29.0212

*Asdaf Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.0212@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of implementing affirmative action policies, which currently have not achieved optimal results due to the lack of representation of women in the legislature, especially in Sijunjung Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the factors that influence the low representation of women and to obtain an overview of the strategies used to optimize affirmative action. **Method:** This study uses the Quasi-Qualitative Design (DQQ) method and an analysis of the theory of gender bias according to Mansour and the theory of representativeness according to Philips. Data collection techniques were carried out by semi-structured interviews (4 informants), documentation, and questionnaires (23 respondents). **Result:** The findings obtained by the authors in this study are the limited number of qualified and qualified women in politics, the lack of support among women, the lack of experience in organizations, the influence of patriarchal culture, the assumption that women are responsible in the domestic sector, the lack of willingness of political elites to open up opportunities for women's involvement, and the lack of coordination between groups on gender matters. The strategy used in optimizing affirmative action is to continue to encourage women to join parties or community organizations, to encourage political parties to involve women, and to empower women. **Conclusion:** The low representation of women is influenced by two internal and external factors. Internal factors include the limited number of qualified and qualified women in politics; the lack of support among women; the lack of experience in organizations and external factors, namely the influence of patriarchal culture; the assumption that women are responsible in the domestic sector; the lack of willingness of political elites to create opportunities for women's involvement; and lack of coordination between groups on gender issues. The strategy used in optimizing affirmative action is to continue to encourage women to join parties or community organizations, to encourage political parties to involve women, and to empower women. In order to optimize affirmative action, it is recommended to increase the role of political parties in affirmative action policies, affirmation, and renewal of regulations based on the pattern of development of the Indonesian people regarding the 30% quota.

**Keywords:** Affirmative Action; Women; Women's Representation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan Implementasi kebijakan *affirmative action* yang saat ini belum mencapai hasil optimal, dikarenakan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Kabupaten Sijunjung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dan memperoleh gambaran mengenai strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan *affirmative action*. Penelitian ini menggunakan metode *Desain Quasi-Qualitative* (DQQ) dan analisis terhadap teori bias *gender* menurut Mansour serta teori keterwakilan menurut Philips. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (4 informan), dokumentasi, dan penyebaran kusioner (23 responden). **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi, adanya pengaruh budaya patriaki, anggapan bahwa perempuan bertanggungjawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan *gender*. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan *affirmative action* yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. **Kesimpulan:** Rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi dan faktor eksternal yaitu pengaruh budaya patriaki, anggapan bahwa perempuan bertanggungjawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan *gender*. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan *affirmative action* yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Guna mengoptimalkan *affirmative action* tersebut disarankan adanya peningkatan peran partai politik dalam kebijakan *affirmative action*, penegasan dan pembaharuan regulasi berdasarkan pola perkembangan masyarakat Indonesia terkait kuota 30%.

**Kata kunci:** *Affirmative Action*; Perempuan; Keterwakilan Perempuan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Masalah kesetaraan dan keadilan *gender* sering diperbincangkan baik itu secara lokal maupun internasional. Salah satunya dibahas dalam Konvensi yang dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan yaitu *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* merupakan konvensi internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

tahun 1979 yang berfokus dalam melawan diskriminasi gender (Women, Peace and Security: Gender Equality in Peacekeeping Operations dalam Nurul Istiana Hasan and Akbar Kurnia Putra, no. 2 (2021): 169–192.) Sedangkan di Indonesia, kesetaraan dan keadilan *gender* yang belum optimal dapat dilihat dari minimnya keterwakilan perempuan di ranah politik khususnya di dalam lembaga legislatif.

Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Salah satunya dapat dilihat dari adanya aturan untuk memberikan kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan dalam dunia politik disebut dengan kebijakan *affirmative action*. Aturan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan diperbarui serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan *affirmative action* itu sendiri merupakan bentuk diskriminasi yang dipandang positif, karena sifatnya sementara dan digunakan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi perempuan demi meraih peluang yang sama dalam dunia politik (Sayuti, (2013): 46.).

Kebijakan *affirmative action* ini tidak langsung memberikan perubahan yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan. Karena kenyataannya, Indonesia yang merupakan Negara dengan total populasi penduduk menurut Badan Statistik Nasional pada tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa dengan populasi penduduk perempuan sebesar 133,5 juta jiwa atau sebesar 49,42 persen ini, belum terwakilkan dalam lembaga legislatif di Indonesia. Hal ini terbukti dari hasil Pemilu tahun 2019, keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berjumlah 120 anggota Legislatif perempuan dari total anggota DPR-RI 575 atau berkisar pada angka 20,8 persen(Lampiran Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019. n.d.).

Hal ini juga terjadi pada Lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Kasus ini dapat dilihat dari hasil pemilu terpilih anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009, 2014, dan 2019 berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Data tersebut menunjukkan bahwa saat sekarang ini representasi perempuan memang mengalami kenaikan namun, angka tersebut belum mengimbangi keterwakilan perempuan yang diharapkan, mengingat total populasi perempuan menurut data Badan Statistik Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berjumlah 115.191 penduduk dari total 235.045 penduduk Kabupaten Sijunjung atau berkisar 49,01 persen. Kenyataan ini sangatlah memprihatinkan karena kebijakan *affirmative action* belum terealisasikan dengan sempurna.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan *affirmative action* ini yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor-faktor internal tersebut adalah karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Sijunjung, terbatasnya jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi yang memadai di dalam politik, serta karena masih kurangnya kesadaran kaum perempuan terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Faktor-faktor eksternal yang juga mempengaruhi keterwakilan perempuan adalah budaya masyarakat Kabupaten Sijunjung yang mayoritas suku Minangkabau. Walaupun suku Minangkabau memiliki sistem kekerabatan dari garis ibu atau matrilineal, namun masyarakat tetap menganut patriarki yaitu laki-laki berperan sebagai pengambil keputusan. Faktor selanjutnya adalah kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dalam politik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang belum serius dalam melakukan persiapan untuk kaderisasi calon anggota legislatif perempuan, Rendahnya dukungan dari kaum perempuan dan kurangnya aktivitas koordinasi dari kelompok yang berwenang dalam urusan *gender*. Hal inilah yang mempengaruhi kesiapan terhadap kaderisasi calon anggota legislatif perempuan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks yang sama yaitu politik *gender* dalam bentuk keterwakilan perempuan di dunia politik. Penelitian Aisah Putri Budiatri ( Budiatri, 2011) berjudul Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses legislasi Undang-Undang yang Responsif *Gender* menemukan bahwa Perbandingan kinerja dan peran anggota legislatif perempuan ternyata lebih baik dari pada anggota legislatif laki-laki dalam proses legislasi DPRD periode 2004-2009. Penelitian Lidya Victorya Pandiangan (Pandiangan,(2017): 148–155.) dalam judul Perempuan Politisi Minangkabau dalam Dunia Politik menemukan bahwa Pemaknaan politik bagi perempuan minangkabau sangat identic dengan kekuasaan, pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan profesi, serta adanya kontribusi dari budaya matrilineal karena posisi perempuan Minang dekat dengan stakeholder

Penelitian Muhadam Labolo, Aries Djaenuri, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhilah ( Labolo et al. vol. 53, 2019.) menemukan Kemenangan Chusnunia Chalim dalam membangun kepercayaan politik sebagai wakil gubernur Provinsi Lampung dikarenakan komunikasi politik yang efektif, jaringan sosial dan loyalitas massa yang kuat, serta penyusunan sasaran utama dalam kampanye yang tepat. Hal ini menyebabkan kontestasi politik akan menjadi tonggak dan pemicu tokoh-tokoh perempuan lain untuk melibatkan diri dalam lingkup politik di Provinsi Lampung. Penelitian Ririn Edfandiyani Putri(Putri 2019) menemukan bahwa Kesadaran politik cukup berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih perempuan, terutama kesadaran politik yang kognitif dalam pemilihan legislatif Kabupaten Sijunjung di tahun 2014 . selanjutnya penelitian ari Asmar Nia, Pebrihariati Sanidjar, Chandra

Helmi(Nia, Sanidjar, and Helmi 2020) menemukan bahwa Peran KPU dalam memenuhi keterwakilan perempuan pada legislatif 2019 di Sumatera Barat telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pasal 248(1) dan 249(2), kendala dalam mewujudkannya adalah minimnya partisipasi masyarakat, minimnya partisipasi partai politik dalam seminar, terbatasnya media informasi. Hal ini bisa diselesaikan dengan melakukan sosialisasi kepada komunitas perempuan dan mengadakan seminar partai politik yang lebih tegas.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan tema yang sama dari penelitian tersebut yaitu politik *gender* dalam bentuk keterwakilan perempuan di dunia politik, peneliti lebih menekankan penelitian ini pada optimalisasi kebijakan yang ada yaitu kebijakan *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung. Optimalisasi *affirmative action* ini perlu dilakukan guna mewujudkan representasi perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dari peneliti-peneliti tersebut di atas, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian semi kualitatif atau *Design Quasi Qualitative (DQQ)* dengan menggunakan alat analisis berupa *Manual Data Analysis Procedure (MDAP)*.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung dan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi dalam mengoptimalkan *affirmative action* guna meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang sekarang dikenal dengan *Desain Quasi-Qualitative (DQQ)* atau desain semi kualitatif dan menganalisis data menggunakan teknik *Manual Data Analysis Procedure (MDAP)*, yaitu teknik analisis data dengan pemrosesan manual(Bungin 2020). Menurut Straus dan Glaser dalam Bungin(Bungin 2020), “tahapan-tahapan MDAP disebut sebagai *theoretical sampling*, yaitu sebuah proses dalam pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan, mengodekan dan menganalisis serta menentukan data apa yang perlu untuk dikumpulkan, selanjutnya dimana data tersebut bisa didapatkan untuk mengembangkan teori yang perlahan mulai tampak”. Penggunaan alat analisis data pada penelitian ini hanya menggunakan tujuh tahapan *theoretical sampling* dalam MDAP yaitu catatan harian, transkrip, pengkodean (coding), kategorisasi, tema, memos dan triangulasi hasil.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara semi terstruktur terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Kabupaten Sijunjung (1 orang), Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung (1 orang), Anggota legislatif

perempuan Kabupaten Sijunjung (2 orang). Adapun pengumpulan data selanjutnya dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 23 orang yang memanfaatkan googleform sebagai survey secara digital. Adapun analisisnya menggunakan teori bias *gender* menurut Mansour (Fakih dalam Hajir, 2013) yang terdiri dari *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja serta teori keterwakilan menurut Philips(Phillips 1997, 1–4) yang terdiri dari *politic of idea* dan *politic of presence*

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu yang pertama teori bias *gender* menurut Mansour (2016) sebagai *grand theory* dengan fokus analisis yaitu marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja yang tidak seimbang. Teori yang kedua yaitu teori keterwakilan menurut Phillips (1997) dengan fokus analisis yaitu *politics of idea* dan *politics of presence*. Teori bias *gender* dan teori keterwakilan tersebut digunakan untuk menganalisis optimalisasi *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Marginalisasi**

Penulis menganalisis optimalisasi *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dilihat dari sikap yang ditunjukkan kepada perempuan dari segi peraturan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Di Kabupaten Sijunjung itu sendiri, berbagai macam fasilitas pemberdayaan perempuan telah disediakan. Salah satunya yaitu GOW atau Gabungan Organisasi Wanita. Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM GOW ini masih belum berjalan optimal. Selain itu, belum ada fasilitas yang disediakan khusus untuk perempuan di Kabupaten Sijunjung dalam mempelajari berbagai hal tentang politik.

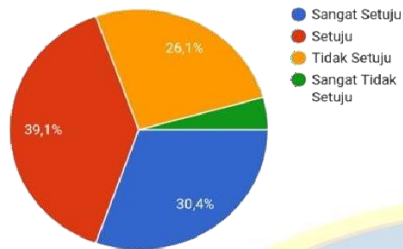
#### **3.2. Subordinasi**

Penulis melakukan analisis berdasarkan ada tidaknya diskriminasi dalam beberapa hal yang dialami perempuan, terutama dilihat dari pendidikan. Diskriminasi ini terbentuk karena adanya beberapa kendala sehingga timbul situasi untuk mengutamakan pendidikan anak laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dan survey yang dilakukan penulis, dimensi subordinasi dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung erat kaitannya dengan minimnya pendidikan politik yang ditempuh oleh perempuan di Kabupaten Sijunjung. Dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

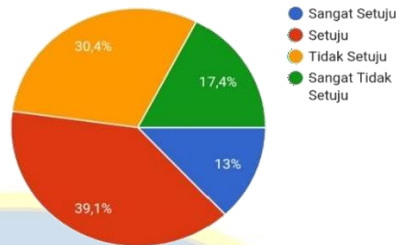
1. Perempuan yang terjun ke dunia politik masih dipandang tidak layak

23 jawaban



2. Pendidikan politik perempuan yang rendah

23 jawaban



Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa minimnya pendidikan politik di Kabupaten Sijunjung dikarenakan masih adanya pola pikir bahwa perempuan tidak perlu untuk mendapatkan pendidikan politik. Selain itu, jenjang pendidikan yang ditempuh perempuan di Kabupaten Sijunjung masih lebih rendah daripada jenjang pendidikan laki-laki.

### 3.3. Stereotype

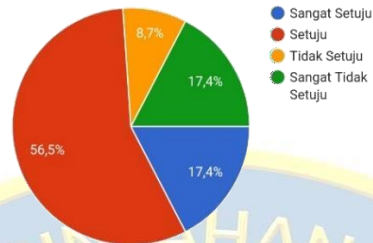
Penulis menganalisis rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung melalui penilaian terhadap hasil kerja perempuan di sektor publik. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota legislatif perempuan Kabupaten Sijunjung, dimensi *stereotype* dalam keterwakilan perempuan ini dapat dilihat dari kurangnya apresiasi terhadap perempuan yang bekerja di Ranah politik. Salah satu penyebab timbulnya *stereotype* negatif terhadap perempuan yang menjadi anggota legislatif yaitu setelah dipilih dan menjabat di DPRD, hanya sebagai penonton atau tidak ikut bersuara. Sehingga ini menimbulkan opini publik bahwa perempuan rata-rata hanya sebagai pelengkap suatu kebijakan yang dibuat pemerintah

### 3.4. Kekerasan

Kekerasan ditempatkan kedalam hubungan kedudukan, dimana laki-laki sebagai pihak yang (lebih kuat secara fisik) lebih tinggi dari pada perempuan (yang secara fisik lebih lemah). Sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena kekuasaan dan *stereotype gender* yang dilabelkan pada perempuan. Dapat dilihat dari gambar berikut ini :

9. Perempuan yang bekerja di bidang politik lebih menggunakan emosional/perasaan daripada logika

23 jawaban



Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022

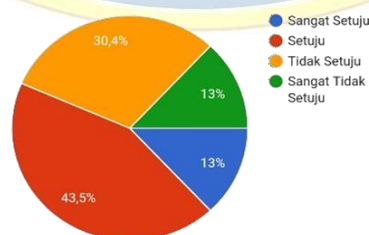
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, sebanyak 73,9% masyarakat Kabupaten Sijunjung masih beranggapan bahwa perempuan yang bekerja baik di Sektor domestik maupun publik lebih menggunakan emosional daripada logika. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan bagi perempuan untuk menduduki jabatan legislatif di Kabupaten Sijunjung saat ini.

### 3.5. Beban kerja yang tidak seimbang

Penulis menganalisis rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung melalui budaya dan tradisi dari peran *gender* perempuan untuk bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan di sektor domestik. Sehingga beban kerja yang ditanggung perempuan akan lebih besar dari laki-laki, apabila perempuan juga melakukan pekerjaan disektor publik. Berbagai macam permasalahan yang termasuk kedalam beban kerja yang tidak seimbang ini, salah satunya adalah tradisi dan adat istiadat yang telah berakar di tengah-tengah masyarakat. Tradisi yang dimaksud adalah kodrat utama perempuan yang menjadi penanggung jawab berbagai pekerjaan didalam rumah,

4. Tidak efektif karena perempuan memiliki tanggung jawab atau pekerjaan utama di rumah

23 jawaban



Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022



Berdasarkan gambar hasil survey di atas, bahwasanya sebanyak 60,8% masyarakat setuju bahwa pekerjaan di Sektor domestik merupakan tanggung jawab perempuan. Pekerjaan yang menjadikan perempuan yang bekerja di sektor publik memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih besar. Berikut tabel yang menunjukkan status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Sijunjung,

**Tabel Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja selama seminggu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018**

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah /Total
1.	Berusaha Sendiri	18.011	10.562	28.573
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	9.972	8.987	18.959
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.304	778	4.082
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	15.761	12.298	28.059
5.	Pekerja Bebas	11.322	3.611	14.933
6.	Pekerja Keluarga/Tak dibayar	3.331	8.124	11.455

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, perempuan yang bekerja di keluarga/tanpa dibayar memiliki total perbandingan yang lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian laki-laki yang bekerja di sektor publik memiliki perbandingan yang lebih besar dari perempuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan di sektor domestik masih menjadi tanggung jawab perempuan, dan perempuan yang bekerja di sektor publik hanya sebagai pencari nafkah tambahan.

### 3.6. Politic of idea (politik ide)

Menganalisis keterwakilan perempuan melalui *Politic of idea* (politik ide) yaitu dengan menjelaskan bentuk keterwakilan yang terjadi apabila keberadaan wakil-wakil politik dikarenakan adanya pengusulan gagasan dan pendapat dari orang-orang yang diwakilkan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, anggota legislatif di Kabupaten Sijunjung dipilih berdasarkan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara yang diberikan masyarakat kepada setiap calon yang berhasil menang dalam Pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019, yaitu sebanyak 30 orang yang memperoleh suara terbanyak merupakan calon yang mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tugas dan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sijunjung

### 3.7. Politics of presence (politik kehadiran)

Menganalisis keterwakilan perempuan melalui *Politics of presence* (politik kehadiran), yaitu dengan menjelaskan tentang keterwakilan politik yang timbul

dengan menyesuaikan keberadaan kelompok-kelompok di masyarakat agar kebutuhan dan kepentingan setiap kelompok dapat tersalurkan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris KPU pada Jumat, 14 Januari 2022, mengemukakan bahwa :

Proses pencalonan oleh partai politik yang duduk di DPRD adalah yang dipilih oleh masyarakat yang artinya mereka duduk disana karena adanya kepercayaan dari masyarakat tidak ada kaitannya dengan kepentingan partai politik. jadi saya rasa jika kepentingan partai ataupun pemerintah daerah akan sulit terakomodir dengan mekanisme dari pemilu yang kita laksanakan sekarang ini.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini formasi jabatan pada anggota legislatif khususnya di Kabupaten Sijunjung diisi berdasarkan kepentingan masyarakat dan bukan berdasarkan keberadaan kelompok-kelompok yang diwakilkan. *Politik of presence* khususnya di Kabupaten Sijunjung belum diterapkan, sehingga terdapat berbagai kepentingan masyarakat belum bisa terpenuhi seperti kebutuhan yang berkaitan dengan lingkup masalah perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan keberadaan perempuan sebanyak 49,01% yang merupakan salah satu contoh kelompok dalam masyarakat belum terwakilkan di DPRD Kabupaten Sijunjung.

### **3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Optimalisasi *affirmative action* termasuk kedalam politik *gender* dalam bentuk keterwakilan perempuan di dunia politik. Kabupaten Sijunjung termasuk kedalam salah satu Kabupaten yang memiliki permasalahan tentang rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Penulis menemukan temuan penting yakni kurangnya apresiasi terhadap perempuan yang bekerja di Ranah politik. Salah satu penyebab timbulnya *stereotype* negatif terhadap perempuan yang menjadi anggota legislatif yaitu setelah dipilih dan menjabat di DPRD, hanya sebagai penonton atau tidak ikut bersuara. Sehingga ini menimbulkan opini publik bahwa perempuan rata-rata hanya sebagai pelengkap suatu kebijakan yang dibuat pemerintah. Berbeda dengan yang ditemukan oleh Penelitian Aisah Putri Budiatri ( Budiatri, 2011) dimana Perbandingan kinerja dan peran anggota legislatif perempuan ternyata lebih baik dari pada anggota legislatif laki-laki

Rendahnya keterwakilan perempuan juga dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang telah berakar di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sijunjung dimana masyarakat masih menganggap bahwa pekerjaan di Sektor domestik merupakan tanggung jawab perempuan. Pekerjaan yang menjadikan perempuan yang bekerja di sektor publik memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan penelitian Lidya Victorya Pandiangan (Pandiangan,(2017): 148–155.) yang berfokus pada pemaknaan politik bagi perempuan minangkabau yang sangat identik dengan kekuasaan, pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan profesi, serta adanya kontribusi dari budaya matrilineal karena posisi perempuan Minang dekat dengan stakeholder.

Penelitian Muhadam Labolo, Aries Djaenuri, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhilah (Labolo et al. vol. 53, 2019.) peneliti terdahulu lebih fokus kepada gambaran politik gender dalam kontestasi kepala daerah di Provinsi Lampung serta bagaimana strategi kandidat pemimpin perempuan dalam menghadapi masalah berupa isu-isu misoginis dalam usaha memenangkan pilkada sedangkan penelitian ini membahas strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan *affirmative action*.

Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh faktor Kesadaran terhadap pentingnya partisipasi politik pemilih bagi perempuan layaknya temuan dari penelitian Ririn Edfandiyani Putri (Putri 2019). Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif yaitu dengan mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat sejak dini; keharusan bagi partai politik untuk melibatkan perempuan; dan pemberdayaan perempuan hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya keterwakilan perempuan bagi masyarakat di Kabupaten Sijunjung khususnya bagi perempuan yang juga ditemukan oleh penelitian dari Asmar Nia, Pebrihariati Sanidjar, Chandra Helmi (Nia, Sanidjar, and Helmi 2020)

### **3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat optimalisasi *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung, yakni: (a) Perempuan yg mencalonkan diri masih belum dikenal oleh masyarakat;

(b) Dukungan dari sesama perempuan masih kurang; (c) Pendidikan politik bagi perempuan yang di usungkan belum berjalan optimal (beberapa partai hanya menjadikan perempuan sebagai alat kelengkapan data )

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa: (a) Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif di Kabupaten Sijunjung adalah faktor Internal, yaitu terbatasnya jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar sesama perempuan itu sendiri serta pengalaman perempuan dalam berorganisasi maupun keterlibatan dalam partai politik, kemampuan ekonomi dan kepercayaan serta faktor eksternal, yaitu budaya patriaki yang masih mengakar, masih adanya anggapan bahwa perempuan pemegang tanggung jawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dalam politik dan kurangnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan *gender*. (b) Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung yaitu mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi

masyarakat sejak dini; keharusan bagi partai politik untuk melibatkan perempuan; dan pemberdayaan perempuan

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya menggunakan tujuh tahapan *theoretical sampling* dalam MDAP yaitu catatan harian, transkrip, pengkodean (coding), kategorisasi, tema, memos dan triangulasi hasil.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Mengoptimalkan *Affirmative Action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak baik dari KPU Kabupaten Sijunjung maupun masyarakat yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Budiatri, Aisah Putri. 2011. “Perbandingan Peran Dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Proses Legislasi Undang-Undang Yang Responsif Gender.” 6(3).

Bungin, Burhan. 2020. *Social Research Methods (Post-Qualitative)*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana.

Hajir, Mohammad. 2020. “Bias Gender Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia SMA Kurikulum 2013 Edisi Revisi.”

Hasan, Nurul Istiana, and Akbar Kurnia Putra. 2021. “Peran Perempuan Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1(2): 169–92.

Labolo, Muhadam, M.Aries Djaenuri, Teguh Ilham, and Hasna Azmi Fadhillah. 2019. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* *Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung*.

“Lampiran Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.”

Nia, Asmar, Pebrihariati Sanidjar, and Chandra Helmi. 2020. “Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Memenuhi Keterwakilan

Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Provinsi Sumatera Barat.”

Pandiangan, Lidya Victorya. 2017. “Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik.” *Jurnal Politik Muda* 6(2): 148–55.

Phillips, Anne. 1997. 107 oxford university press *The Politics of Presence*. Anne Phillips. New York.

Putri, Ririn Edfandiyani. 2019. “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Sijunjung.”

Sayuti, Hendri. 2013. “Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan).” *Menara Riau* 12(1): 41–47.

